

**KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN MENJADI DESA TERBAIK TAHUN 2017
(Studi Kasus pada Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai
Kabupaten Pesawaran)**

(Skripsi)

Oleh:

Dhian Safitri



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN MENJADI DESA TERBAIK TAHUN 2017 (Studi Kasus pada Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)

Oleh:

Dhian Safitri

Desa Gunungrejo memperoleh predikat desa terbaik dalam lomba desa tingkat nasional. Predikat yang diraih ini tidak terlepas dari kepemimpinan kepala desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepemimpinan kepala desa Gunungrejo dalam tata kelola pemerintahan menjadi desa terbaik pada Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori tata kelola pemerintahan menurut Suprijadi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemimpinan kepala Desa Gunungrejo dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik telah menerapkan asas akuntabilitas, asas keterbukaan dan transparansi, asas partisipasi dan asas responsif. Pertama, Pengelolaan keuangan desa sudah akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Kedua, masyarakat desa Gunungrejo mengetahui apa saja kebutuhan dana yang dikeluarkan dalam setiap kegiatan desa melalui musrembangdes. Ketiga, Kepala desa dan aparat pemerintah desa telah melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan dalam membentuk badan usaha milik desa (BUMDes). Keempat, Kepala desa Gunungrejo sudah berupaya melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Kepala Desa dan Tata Kelola Pemerintahan.

ABSTRACT

THE LEADERSHIP OF GUNUNGREJO HEADMAN IN GOVERNANCE BECOME THE BEST VILLAGE (A Case Study at Gunungrejo Village Sub-District Way Ratai Distric Pesawaran)

By:

Dhian Safitri

Gunungrejo village gets predicate as the best village in National contest level. Predicate obtained through the intervention of the headman. The purpose of this research to know the leadership of Gunungrejo headman in government system to be the best village in Gunungrejo village Sub-District Way Ratai District Pesawaran. A theory used in this research is governance theory by Suprijadi. This research used descriptive analysis with a qualitative approach. This research was held in October. Then, data collection techniques that the researcher used are interview, observation and documentation. The results of the study show that the leadership of the village head of Gunungrejo in order to realize good governance has applied the principle of accountability, the principle of transparency and transparency, the principle of participation and responsive principles. First, the management of village finance is accountable starting from planning, implementation, administration, reporting, to accountability. Secondly, the Gunungrejo village community knows what funding needs are spent in each village activity through the musrembangdes. Third, the village head and village government officials have involved the community in every activity in forming village-owned enterprises (BUMDes). Fourth, the village head of Gunungrejo has tried to do the best service to the community in facilities and infrastructure.

Keywords: Leadership, Headman, and Governance.

**KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM TATA KELOLA
Pemerintahan Menjadi Desa Terbaik Tahun 2017
(Studi Kasus Pada Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai
Kabupaten Pesawaran)**

Oleh

Dhian Safitri

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi:

**KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM
TATA KELOLA PEMERINTAHAN MENJADI
DESA TERBAIK TAHUN 2017 (Studi Kasus
Pada Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai
Kabupaten Pesawaran)**

Nama Mahasiswa

: **Dhian Safitri**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1416021034**

Program Studi

: **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dr. Feni Rosalia, M.Si.

NIP. 19690219 199403 2 001

Darnawan Purba, S.IP., M.IP.

NIP. 19810601 201012 1 003

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

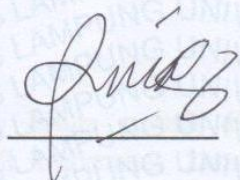
Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.

NIP. 19611218 198902 1 001

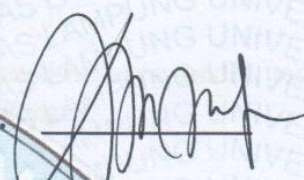
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

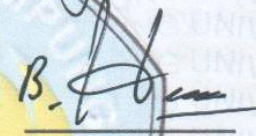
Ketua : Dr. Feni Rosalia, M.Si.



Sekretaris : Darmawan Purba, S.IP., M.IP.



Penguji Budi Harjo, S.Sos., M.IP.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya, M.Si.
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 8 April 2019

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 8 April 2019

Yang Membuat Pernyataan



Dhian Safitri
NPM. 1416021034

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Dhian Safitri, dilahirkan di Kota Bumi pada 20 Februari 1996. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putri dari Bapak Ardani Ahmad dan Ibu Sulastri.

Jenjang pendidikan penulis dimulai dari tahun 2001-2002 di Taman Kanak-Kanak RA AL-Hidayah Dayamurni. Selanjutnya menempuh pendidikan di SDN 4 Dayamurni 2002-2008. Setelah lulus Sekolah Dasar penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Tumijajar 2008-2011, lalu melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Tumijajar 2011-2014.

Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Negeri Universitas Lampung, penulis terdaftar menjadi mahasiswa di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung tahun 2014.

MOTTO

“Harta apasaja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua,
kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang berada dalam perjalanan. Dan kebaikan apasaja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui”
(QS. Al Baqarah: 215)

“Baginya adalah apa yang mereka telah usahakan dan bagimu adalah apa yang telah kamu usahakan” (QS. AL Baqarah: 141)

“Pengetahuan tidak hanya didasarkan pada kebenaran saja, tetapi juga kesalahan”
(Dhian Safitri)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alamiin telah Engkau Ridhoi Ya Allah langkah hambaMu,
Sehingga Skripsi ini pada akhirnya dapat terselesaikan pada waktunya.

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW
Semoga Kelak Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat

dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada :

“Ayahanda Ku Ardani Ahmad, S.H dan Ibunda Ku Sulastri S.Pd” Terimakasih
atas Doa dan Kasih yang Tiada Habisnya serta Setiap Perjuangan yang Telah
Kalian Curahkan untuk Seluruh Anak-Anaknya. Semoga Karya Ini Dapat
Membuat Bangga dan
Memberikan Kebahagiaan Atas Segala Jerih Payah yang Telah Dikerjakan

“Adik ku” Yusron Fauzi. Terimakasih Atas Segala Doa, Kasih Sayang, dan
Semangat yang Telah di Berikan.

Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan,
Semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Skripsi yang berjudul “Kepemimpinan Kepala Desa Gunungrejo dalam Tata Kelola Pemerintahan Menjadi Desa Terbaik (Studi Kasus Pada Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih dengan segala hormat dan kerendahan hati kepada:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung beserta seluruh dosen dan staf, terimakasih atas bantuan serta ilmu-ilmu yang diberikan sehingga mampu menjadi jendela wawasan bagi penulis di masa

kini dan masa yang akan datang. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak dan ibu baik di dunia ataupun di akhirat kelak.

3. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si. selaku dosen pembimbing pertama penulis. Terimakasih atas ilmu, masukan serta saran yang sangat membangun terutama dalam proses menyelesaikan skripsi ini, terimakasih juga atas kebaikan serta segala pengertiannya selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan ibu akan diterima oleh Allah SWT dan semoga limpahan rahmat dan karunia-Nya selalu tercurahkan kepada ibu baik di dunia maupun di akhirat kelak.
4. Bapak Darmawan Purba, S.IP, M.IP. selaku pembimbing kedua. Terimakasih kesabarannya untuk meluangkan waktu guna membimbing penulis, atas segala ilmu, saran yang sangat bermanfaat serta tidak lelah untuk selalu memotivasi dan membantu penulis agar tetep semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan bapak akan diterima oleh Allah SWT dan semoga limpahan rahmat kebaikan dan karunia-Nya selalu tercurahkan kepada bapak baik di dunia maupun di akhirat kelak.
5. Terimakasih Bapak Budi Harjo, S.Sos, M.IP. selaku dosen pembahas yang selalu mampu memberikan pengetahuan baru, masukkan serta kritik yang sangat bermanfaat baik dalam proses perkuliahan maupun dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan bapak akan diterima oleh Allah SWT dan semoga limpahan rahma dan karunia-Nya selalu tercurahkan kepada bapak, baik di dunia maupun di akhirat kelak.
6. Terimakasih Ibu Dwi Wahyu Handayani, S.IP, M.Si Selaku dosen pembimbing akademik penulis. Terimakasih atas segala ilmu yang sangat

bermanfaat bagi penulis. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak..

7. Kedua orang tua, Ayahanda dan Ibunda tercinta, Ardhani Ahmad, S.H dan Sulastri, S.Pd, atas segala doa, cinta dan kasih sayang, dukungan dan semangat serta perhatian yang terus mengalir yang tidak akan mampu penulis balas segala jasa kebaikannya sampai kapanpun. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kesehatan, kasih sayang, dan surga-Nya sebagai balasan atas segala jasa dan kebaikan Ayahanda dan Ibunda tercinta.
8. Seluruh informan atau narasumber penelitian terutama Bapak Kepala Desa Gunungrejo Bapak Suranto dan Bapak Munardi selaku Sekdes Desa Gunungrejo yang telah mendukung penulis dalam menyusun skripsi. Terimakasih telah menjadi informan atau narasumber penulis serta menjadi teman berdiskusi mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak/ibu semua baik di dunia maupun di akhirat kelak.
9. Sahabat-Sahabat angkatan 2014, Ana Puspita Sari S.IP, Nia Novita Putriansyah S.IP, Miss Retno Wulandari S.IP, Ulfa Umayya Sari S.IP, Debby Nurlita S.IP, Ulfa Putri Andani S.IP, Kartika Nur Fitriana S.IP, Tika Wurianti S.IP, Ratih Retno Aji S.IP, serta kawan-kawan yang sedang berjuang, maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Terimakasih atas semua doa dan dukungannya. Semoga kalian selalu diberikan kemudahan dan kelancaran menuju sukses.
10. Sahabat-Sahabat Alriza Rahayu, Rena Roy, Anung Indrayani, Anggi Julia, Triana Malik, Riza Mauza, yang telah menjadi sahabat terbaik bagi penulis

dan memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis. Semoga kalian selalu diberikan kemudahan dan kelancaran menuju sukses.

11. Terimakasih juga kepada Sugara Jaya Rades, S.E yang telah menjadi teman penulis, yang telah menjadi tempat bagi penulis untuk berbagi atas segala rasa bahagia dan kesedihan serta menjadi teman yang selalu membantu penulis dan memberi semangat kepada penulis. Semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran menuju sukses.

Bandar Lampung, 08 April 2019

Dhian Safitri

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Kepemimpinan.....	11
1. Pengertian Kepemimpinan.....	11
2. Gaya Kepemimpinan	12
3. Ciri-Ciri Pemimpin Ideal dan Nilai Kepemimpinan.....	15
4. Fungsi dan Peran Pemimpin Dalam Organisasi.....	18
B. Pemerintahan Desa.....	23
1. Pengertian Pemerintahan Desa.....	23
2. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	25
C. Kepemimpinan Kepala Desa.....	29
D. Tata Kelola Pemerintah yang Baik (<i>Good Governance</i>).....	35
1. Pengertian <i>Good Governance</i>	35
2. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	36
3. Karakteristik dan Syarat Tata Kelola Pemerintah yang Baik.....	45
E. Kerangka Pikir	49
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	53
B. Fokus Penelitian.....	54
C. Lokasi Penelitian.....	56
D. Jenis Data	56
1. Data Primer	56
2. Data Sekunder.....	57
E. Teknik Penentuan Informan.....	58
F. Teknik Pengumpulan Data.....	59
1. Wawancara.....	59

2. Dokumentasi	60
3. Observasi.....	60
G. Teknik Analisis Data.....	61
1. Reduksi Data.....	61
2. Penyajian Data	61
3. Menarik Kesimpulan.....	62
H. Teknik Keabsahan Data	62

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Gunungrejo.....	63
1. Sejarah Singkat Desa Gunungrejo	63
2. Kependudukan Desa Gunungrejo	64
3. Pemerintahan Desa Gunungrejo.....	64
4. Penyelenggaraan pemerintah Desa Gunungrejo.....	67

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kepala Desa	71
B. Kepemimpinan Kepala Desa Gunungrejo.....	72
1. Penerapan Asas Akuntabilitas (<i>Accountability</i>).....	73
2. Penerapan Asas Keterbukaan dan Transparansi (<i>Openness and Transparency</i>)	80
3. Penerapan Asas Partisipasi	83
4. Penerapan Asas Responsif	89
C. Pembahasan.....	98
1. Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Gunungrejo dalam Tata Kelola Pemerintahan pada Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran	98
a. Analisis Penerapan Asas Akuntabilitas (<i>Accountability</i>).....	99
b. Analisis Penerapan Asas Keterbukaan dan Transparansi (<i>Openness and Transparency</i>)	105
c. Analisis Penerapan Asas Partisipasi.....	108
d. Analisis Penerapan Asas Responsif	115

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	124
B. Saran.....	125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Desa Desa Terbaik di Indonsia Tahun 2017	3
2. Penelitian Terdahulu.....	7
3. Fokus Penelitian	55
4. Jumlah Informan.....	59
5. Implementasi Sistem Good Governance Desa Gunungrejo	68
6. Jumlah Sarana dan Prasarana di Kantor Desa Gunungrejo.....	91
7. Rekapitulasi Hasil Penelitian.....	97
8. Kesimpulan Penerapan Asas	121
9. Triagulasi Data Penelitian	123

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan suatu upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara dan cita-cita nasional, salah satu tujuan dari pembangunan nasional sebagaimana nawacita program pemerintahan Joko Widodo yaitu membangun Indonesia dari pinggir dengan kata lain percepatan pembangunan di desa-desa tertinggal untuk mengurangi angka kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Maju atau tidaknya Negara Republik Indonesia tergantung maju atau tidaknya desa dan masyarakat desa, untuk itu pemerintah pusat dan provinsi menyamakan persepsi bahwa menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan. Sedemikian pentingnya desa dalam percepatan pembangunan oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dengan tujuan hendak mengangkat desa pada posisi subjek yang terhormat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia.

Provinsi Lampung meraih juara pertama nasional Lomba Desa tingkat Nasional Regional 1 wilayah sumatra Tahun 2017. Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan pemerintahnya memiliki 15 Kabupaten/Kota, dengan 225 Kecamatan dan 2.640 desa yang tersebar di 15 Kabupaten dan Kota diseluruh penjuru Provinsi Lampung (Data Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2017). Dari 2.640 desa yang ada di Provinsi Lampung, pada tahun 2017 hanya Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung yang meraih juara pertama nasional Lomba Desa Tingkat Nasional Regional I Wilayah Sumatera.

Tahapan penyelenggaraan perlombaan Desa dan kelurahan meliputi penilaian administrasi, klarifikasi lapangan, plone penilaian hasil klarifikasi lapangan dan pemaparan Kades/Lurah calon juara lomba serta penetapan juara lomba Desa dan Kelurahan serta mendorong Desa dan Kelurahan yang lebih baik. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa dan Kelurahan menjadi maju, mandiri dan sejahtera, yang pada akhirnya menjadi *best practice* dan modal percontohan bagi desa dan kelurahan lain nya di Indonesia (Dikutip dari <http://binapemdes.kemendagri.go.id/berita/2017/08-pukul-20.05>).

Berdasarkan data dari *web site* Resmi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri (<http://www.binapemdes.kemendagri.go.id>) menetapkan daftar 3 (tiga) besar desa terbaik tahun 2017 salah satunya adalah Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung yang meraih juara pertama nasional Lomba Desa Tingkat

Nasional Regional I Wilayah Sumatera. Penghargaan diberikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kepada Gubernur Lampung pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 (Sumber: Teras Lampung.com, di akses 30 Januari 2018).

Tabel 1. Desa-Desa Terbaik di Indonesia Tahun 2017

Wilayah	Nama Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
I	Desa Gunungrejo	Way Ratai	Pesawaran	Lampung
	Toapaya Selatan	Toapaya	Bintan	Koeri
	Buding	Kelapa Kamit	Belitung Timur	Kep. Babel
II	Kutuh	Kutuh Selatan	Badung	Bali
	Sendangsari	Pengasih	Kulonprogo	DIY
	Karanglo	Tawangmangu	Karanganyer	Jateng
III	Batu Belerang	Sinja Borong	Sinja	Sulsel
	Sumber Baru	Angsana	Tanah Bumbu	Kalsel
	Tanjung Karang	Sebatik	Nanukan	Kalut
IV	Lingsar	Lingsar	Lombok Barat	NTB
	Oelua	Rote Barat Laut	Rote Ndao	NTT
	Pohea	Sanana Utara	Kep. Sula	Mal-Ut

Sumber: <http://www.binapemdes.kemendagri.go.id> diakses pada tanggal 30 Januari 2018

Kesuksesan Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dalam meraih juara pertama nasional Lomba Desa Tingkat Nasional Regional I Wilayah Sumatera Tahun 2017 dikarenakan desa tersebut telah masuk dalam kategori desa maju dan telah memuat kriteria sebagaimana yang menjadi instrumen penilaian desa yang tertuang dalam permendagri.

Kriteria dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan meliputi indikator sebagai berikut:

- a. Penilaian administrasi (struktur organisasi, kelembagaan, RPJM Desa atau Dokumen Perencanaan lainnya, pengelolaan keuangan dan profil desa)
- b. Penilaian pemberdayaan partisipasi masyarakat, pemerintahan, lembaga kemasyarakatan
- c. Penilaian klarifikasi lapangan (*public service*)
- d. Penilaian kesejahteraan, ekonomi masyarakat
- e. Penilaian keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan desa
- f. Penilaian pendidikan, inovasi dan produk unggulan desa dan Pemaparan Kades/Lurah.

Merujuk kepada kriteria di atas, kesuksesan Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dalam meraih juara pertama nasional Lomba Desa Tingkat Nasional Regional I Wilayah Sumatera Tahun 2017 disebabkan karena desa Gunungrejo telah masuk dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik (mulai dari kelengkapan administrasi desa, memberdayakan masyarakat desa, dan peningkatan pelayanan publik), dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik tersebut tentu tidak lepas dari peran kepemimpinan kepala desa selaku ujung tombak dalam melaksanakan roda pemerintahan di desa.

Desa Gunungrejo merupakan salah satu desa yang berada di dalam wilayah Kecamatan Way Ratai kabupaten Pesawaran, seperti halnya desa lain Gunungrejo juga memiliki sejarah dan perkembangan tersendiri. Gunungrejo awalnya merupakan salah satu pedukuhan di wilayah Desa Wates way ratai yang terkenal dengan nama Anglo (nama Afdeling wilayah kerja perkebunan karet Way ratai).

Pada tanggal 23 Oktober 1986 Dusun Gunungrejo resmi di mekarkan menjadi Desa persiapan Gunungrejo yang terdiri dari 12 Dusun yaitu Kalipasir I, Kalipasir II, Gunungrejo, Kaliawi, Fajarbulan, Gunungsari, Lebaksari, Tamansari, Totoharjo, Merawan, Sidorejo dan Candipuro. Pada tahun 2013, Desa Gunungrejo dimekarkan menjadi 3 desa yaitu Desa Gunungrejo, Desa Mulyosari dan Desa Poncorejo.

Kepemimpinan desa Gunungrejo mengalami pergantian dari tahun ke tahun dimana pada tahun 1990 Kepala desa di jabat oleh pejabat sementara pak Samsuri sampai bulan September 1992. Pada akhir Desember 1992 desa Gunungrejo melaksanakan pemilihan Kepala Desa yang pertama, secara kronologis Jabatan Kepala Desa Gunungrejo adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 1986 sampai dengan tahun 1990 di jabat oleh bapak Basnu.
- b. Tahun 1990 sampai dengan tahun 1992 di jabat oleh bapak Samsuri.
- c. Tahun 1992 sampai dengan tahun 1994 di jabat oleh bapak Suwardi.TO
- d. Tahun 1994 sampai dengan tahun 2002 di jabat oleh bapak Mulyanto.
- e. Tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 di jabat oleh bapak Rudi Sunandar.

- f. Tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 di jabat oleh bapak Suranto
- g. Tahun 2014 sampai dengan sekarang kembali di jabat oleh bapak Suranto

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 14 dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan di desa mempunyai kewajiban:

- a. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme,
- b. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- c. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan,
- d. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- e. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan didesa.
- f. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.

Undang-Undang di atas mengisyaratkan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik tentu tidak lepas dari peran kepala desa, selaku pemimpin tertinggi di desa, sebuah ungkapan mulia yang mengatakan bahwa pemimpinlah yang bertanggung jawab atas berhasil atau tidaknya dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, ungkapan tersebut merupakan ungkapan yang mendudukkan posisi pemimpin dalam suatu organisasi pada posisi terpenting, dengan kata lain kepemimpinan kepala desa menduduki posisi yang penting dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Sebagai bahan referensi atas penelitian ini, penelitian terdahulu yang penulis kutip dari sumber jurnal yang berhubungan dengan peran kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

Jenis	Peneliti	Judul	Hasil
Jurnal	Febriyanto, Irma Irawati (2016)	Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Studi Di Desa Gunggung Kecamatan Batuan Sumenep)	Hasil penelitian menunjukkan peran kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik telah berjalan efektif, kepala desa melibatkan masyarakat, transparan dalam setiap pengambilan kebijakan
Jurnal	Nova Sulastri (2016)	Peran kepala desa dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna	Hasil penelitian menunjukkan Kepala desa transparan dalam pengelolaan keuangan desa dan pelayanan, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
Jurnal	Weny A. Dunga, Abdul Hamid Tome, Apriyanto Moha (2016)	Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo	Prinsip <i>good governance</i> telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa se Kecamatan Telaga Jaya.

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Febriyanto, Irma Irawati (2016), Nova Sulastri (2016) dan Weny A. Dunga, Abdul Hamid Tome, Apriyanto Moha (2016) hampir memiliki kesamaan dengan yang peneliti lakukan diantaranya adalah:

1. Analisa data sama-sama menggunakan analisa data kualitatif.
2. Instrumen penelitian sama-sama menggunakan wawancara.
3. Metode pengumpulan data sama-sama menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.
4. Hasil observasi penulis sejalan dengan hasil penelitian.

Disisi lain ada perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Febriyanto, Irma Irawati (2016), Nova Sulastri (2016) dan Weny A. Dunga, Abdul Hamid Tome, Apriyanto Moha (2016) dengan yang peneliti lakukan diantaranya adalah :

1. Objek, lokasi, tempat dan waktu penelitian berbeda dengan peneliti
2. Subjek sumber informasi yang dipilih peneliti terdahulu jumlahnya tidak sama
3. Indikator yang dipakai sebagai instrumen penelitian (kisi-kisi) wawancara tidak sama dengan yang peneliti gunakan
4. Jumlah instrumen panduan wawancara tidak sama dengan yang peneliti gunakan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala desa dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, oleh karena itu judul skripsi ini adalah “Kepemimpinan Kepala Desa Gunungrejo Dalam Tata Kelola Pemerintahan Menjadi Desa Terbaik (Studi Kasus pada Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada masalah seperti yang diuraikan tersebut di atas maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kepemimpinan kepala desa Gunungrejo sehingga Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran menjadi desa terbaik?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan bagaimana kepemimpinan kepala desa Gunungrejo sehingga Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran menjadi desa terbaik.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini untuk:

1. Secara akademik
 - a. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, selain itu dapat digunakan sebagai bahan informasi dan rujukan referensi bagi penelitian lebih lanjut.
 - b. Dunia pendidikan: sebagai sumbangan akademis bagi para peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian ilmiah dengan kajian mengenai kepemimpinan kepala desa dalam Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada kepala desa di daerah lain agar mencontoh kepemimpinan yang telah diterapkan oleh kepala desa Gunungrejo sehingga nantinya desa-desa di daerah lain dapat menjadi desa terbaik terutama dalam tata kelola pemerintahan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kepemimpinan

1. Pengertian Kepemimpinan

Pengertian kepemimpinan menurut Tannebaum (2012:2) adalah pengaruh antar pribadi, dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Salusu, (2006: 112) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktifitas kelompok yang diatur untuk mencapai tujuan bersama. Herujito (2005: 67) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah seni kemampuan mempengaruhi perilaku manusia dan kemampuan untuk mengendalikan orang-orang dalam organisasi agar perilaku mereka sesuai dengan perilaku yang diinginkan oleh pimpinan.

Masih berkaitan dengan definisi kepemimpinan Gibson (2006: 80) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah merupakan suatu upaya jenis pengaruh tetapi bukan berupa paksaan (*concoersive*) untuk memotivasi kerja orang-orang mencapai tujuan tertentu. Sementara itu Terry, (2011: 13) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar mereka suka berusaha mencapai tujuan kelompok, dan

seni untuk mempengaruhi tingkah laku manusia dan kemampuan membimbing orang.

2. Gaya Kepemimpinan

Manajemen sumberdaya manusia merupakan kajian ilmu pengetahuan yang membahas mengenai keadaan iklim organisasi baik secara internal maupun secara eksternal. Gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi mempunyai peranan yang sangat penting yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi. Herujito (2005:72) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah (*leadership styles*) merupakan cara yang diambil seseorang dalam rangka mempraktekkan kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan bukan suatu bakat, sehingga dapat dipelajari dan dipraktekkan dan dalam penerapannya harus disesuaikan dengan situasi yang dihadapi.

Pakar kepemimpinan menyatakan bahwa gaya kepemimpinan merupakan perilaku pimpinan terhadap pengikutnya, atau cara yang dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya (Trimo 2005:69). Sementara itu Hersey (2002:113) mengatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola-pola perilaku konsisten yang diterapkan dalam bekerja. Lebih lanjut Suradinata (2007:4) menyatakan bahwa untuk mengetahui lebih dalam tentang gaya kepemimpinan, maka terlebih dahulu harus diketahui perbedaan antara pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin adalah orang yang

memimpin suatu kelompok (dua orang atau lebih), baik pada suatu organisasi maupun keluarga. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Secara konseptual Siagian (2011:131) menyatakan mengenai adanya tiga penekanan gaya kepemimpinan dalam mengelola suatu organisasi, yaitu :

- a. Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang situasional dalam menerapkan berbagai macam gaya kepemimpinan seperti gaya otokratik, paternalistik, laissez faire, demokratik dan kharismatik
- b. Gaya kepemimpinan yang tepat ditentukan oleh tingkat kedewasaan atau kematangan para anggota organisasi
- c. Peranan apa yang diharapkan dapat dimainkan oleh para pemimpin dalam organisasi.

Adapun pembagian gaya kepemimpinan menurut Siagian (2011:157-161) yaitu:

- a. Gaya kepemimpinan otokratis

Gaya ini kadang-kadang dikatakan kepemimpinan yang terpusat pada diri pemimpin atau gaya direktif. Gaya ini ditandai dengan sangat banyaknya petunjuk yang datangnya dari pimpinan dan sangat terbatasnya bahkan sama sekali tidak adanya peran serta anak buah dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

b. Gaya kepemimpinan birokratis

Gaya ini dapat dilukiskan dengan kalimat “Memimpin berdasarkan peraturan”. Perilaku pemimpin ditandai dengan keketatan pelaksanaan prosedur yang berlaku bagi pemimpin dan anak buahnya, sebenarnya gaya ini merupakan bentuk lain dari gaya otokratis.

c. Gaya kepemimpinan demokratis

Gaya ini kadang-kadang disebut juga gaya kepemimpinan yang terpusat pada anak buah. Kepemimpinan konsultatif atau partisipatif. Dalam gaya ini terjadi komunikasi dua arah.

d. Gaya kepemimpinan bebas

Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin sedikit sekali menggunakan kekuasaannya atau sama sekali membiarkan anak buahnya untuk berbuat sesuka hatinya. Gaya kepemimpinan bebas boleh dikatakan tiada kepemimpinan.

Gaya kepemimpinan merupakan upaya mempengaruhi orang-orang untuk ikut dalam pencapaian tujuan bersama. Gaya kepemimpinan juga merupakan pola hubungan antara individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap sekelompok orang agar bekerja bersama – sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki bersama. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu mengelola atau mengatur organisasi secara efektif dan mampu melaksanakan kepemimpinan secara efektif pula, untuk itu pemimpin harus betul-betul dapat menjalankan

fungsinya sebagai seorang pemimpin dengan cara menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan karakteristik bawahan.

3. Ciri-Ciri Pemimpin Ideal dan Nilai Kepemimpinan

Menjadi seorang pemimpin yang berhasil, sangat ditentukan oleh kemampuan pribadi pemimpin. Kemampuan pribadi yang dimaksud adalah kualitas seseorang dengan berbagai sifat, perangai atau ciri-ciri di dalamnya. Ciri-ciri ideal yang perlu dimiliki pemimpin menurut Siagian (2011:34) adalah.

- a. Pengetahuan umum yang luas, daya ingat yang kuat, rasionalitas, obyektivitas, pragmatisme, fleksibilitas, adaptabilitas, orientasi masa depan.
- b. Sifat inkuisitif, rasa tepat waktu, rasa kohesi yang tinggi, naluri relevansi, keteladanan, ketegasan, keberanian, sikap yang antisipatif, kesediaan menjadi pendengar yang baik.
- c. Kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang, analitik, menentukan skala prioritas, membedakan yang urgen dan yang penting, keterampilan mendidik, dan berkomunikasi secara efektif.
- d. Kecerdasan, artinya pemimpin harus memiliki kecerdasan lebih dari pengikutnya, tetapi tidak terlalu banyak melebihi kecerdasan pengikutnya.
- e. Motivasi diri dan dorongan berprestasi, sehingga pemimpin akan selalu energik dan menjadi teladan dalam memimpin pengikutnya.

- f. Sikap-sikap hubungan kemanusiaan, dalam arti bahwa pemimpin harus menghargai dan memperhatikan keadaan pengikutnya.

Menurut Mosley, (2002: 396), menemukan bahwa karakteristik yang nyata merupakan syarat yang penting untuk mencapai kepemimpinan yang efektif. Karakteristik atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pemimpin yang efektif adalah :

- a. *Supervisory ability* atau mengorganisir

Fungsi dasar manajemen, terutama kepemimpinan dan pengendalian pekerjaan bawahan. Mempunyai keahlian dalam mengorganisir dan menggerakkan bawahan secara bijaksana dengan tepat dan kapan dan kepada siapa tanggung jawab dan wewenang didelisasikan, atasan memberi instruksi, bimbingan, arahan pada saat bawahan menyelesaikan pekerjaan kantor.

- b. *Need for occupational achievement* mampu membuat bawahan merasa betah. Mempunyai kepandaian dalam menghadapi bawahan dan mampu membuat bawahan merasa betah, senang dan merasa puas dalam pekerjaan.

- c. Komunikasi

Proses kepemimpinan, yang memindahkan ide seseorang ke orang lain untuk digunakan dalam fungsi-fungsinya memimpin pekerjaan.

- d. Demokrasi

Pola kepemimpinan ini mengandung pengertian bahwa, atasan melakukan musyawarah, diskusi, mendengarkan pendapat bawahan dalam pengambilan suatu kebijakan atau keputusan.

e. Pengawasan atau *controlling* bawahan

Kemampuan memberikan pengawasan terhadap kegiatan kerja.

Berkaitan dengan nilai kepemimpinan Guth (dalam Salusu, 2006: 67) menyatakan ada 6 tipe nilai kepemimpinan yaitu:

a. Teoritik

Nilai-nilai yang tertarik pada usaha mencari kebenaran dan mencari pembenaran secara rasional

b. Ekonimis

Nilai-nilai yang praktis, tertarik pada usaha akumulasi kekayaan

c. Estetik

Tertarik pada aspek-aspek kehidupan yang penuh keindahan, menikmati setiap peristiwa untuk kepentingan sendiri.

d. Sosial

Menaruh belas kasihan kepada orang lain, simpati, tidak mementingkan diri sendiri.

e. Politis

Berorientasi pada kekuasaan dan melihat kompetisi sebagai faktor yang sangat vital dalam kehidupannya.

f. Religius

Selalu menghubungkan setiap aktivitas dengan kekuasaan sang pencipta.

Seorang pemimpin yang efektif tidak hanya mampu mempengaruhi bawahannya tapi juga bisa menjamin bahwa orang-orang yang dipimpinnnya dapat bekerja dengan seluruh kemampuan yang mereka miliki. Selain kemampuan pribadi, seorang pemimpin juga harus mampu membaca keadaan bawahan dan lingkungan yang menaunginya. Ada hal penting yang harus diketahui tentang bawahan adalah kematangan mereka, karena ada hubungan langsung antara kepemimpinan yang tepat untuk diterapkan dengan tingkat kematangan bawahan agar pemimpin memperoleh ketaatan atau pengaruh yang memadai. Hal tersebut diperlukan guna mengetahui kepemimpinan seperti apa yang sebaiknya diterapkan dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi yang seluas-luasnya dari seluruh bawahan.

4. Fungsi dan Peran Pemimpin Dalam Organisasi

Fungsi pemimpin dalam organisasi memiliki peran berbeda dengan bidang kerja atau organisasi lain, perbedaan ini disebabkan oleh beberapa macam hal, antara lain adalah: macam organisasi, situasi sosial dalam organisasi, dan jumlah anggota kelompok. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu mengelola atau mengarahkan organisasi secara efektif dan mampu melaksanakan kepemimpinan secara efektif pula. Untuk itu pemimpin harus betul-betul dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang pemimpin. Fungsi pemimpin dalam organisasi menurut Terry (2011:45) dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: (1) perencanaan (2) pengorganisasian (3) penggerakkan (4) pengendalian.

Dalam menjalankan fungsinya pemimpin mempunyai tugas-tugas tertentu, yaitu mengusahakan agar kelompoknya dapat mencapai tujuan dengan baik, dalam kerja sama produktif dan dalam keadaan yang bagaimanapun yang dihadapi kelompok. Tugas utama pemimpin adalah: (1) membeni struktur yang jelas terhadap situasi-situasi rumit yang dihadapi kelompok, (2) merasakan dan menerangkan kebutuhan kelompok pada dunia luar, baik mengenai sikap, harapan, tujuan, dan kekhawatiran kelompok (Thoha, 2010:25).

Pemimpin dalam suatu organisasi memainkan peranan yang sangat penting tidak hanya secara internal bagi organisasi yang bersangkutan akan tetapi juga dalam menghadapi berbagai pihak di luar organisasi yang kesemuanya dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan organisasi mencapai tujuannya. Peran tersebut dapat dikategorikan dalam tiga bentuk, yaitu.

a. Peranan yang bersifat interpersonal

Dewasa ini telah umum diterima pendapat bahwa salah satu tuntutan yang harus dipenuhi oleh seorang manajer ialah keterampilan insani. Keterampilan tersebut mutlak perlu karena pada dasarnya dalam menjalankan kepemimpinannya, seorang manajer berinteraksi dengan manusia lain, bukan hanya dengan para bawahannya, akan tetapi juga berbagai pihak yang berkepentingan yang dikenal dengan istilah stake holder, di dalam dan di luar organisasi. Itulah yang dimaksud dengan peran interpersonal yang menampakkan diri.

Pertama, selaku simbol keberadaan organisasi. Peranan tersebut dimainkan dalam berbagai kegiatan yang sifatnya legal dan seremonial. Menghadiri berbagai upacara resmi, memenuhi undangan atasan, rekan setingkat, para bawahan, dan mitra kerja. *Kedua*, selaku pemimpin yang bertanggung jawab untuk memotivasi dan memberikan arahan kepada para bawahan yang dalam kenyataannya berurusan dengan para bawahan. *Ketiga*, peran selaku penghubung di mana seorang manajer harus mampu menciptakan jaringan yang luas dengan memberikan perhatian khusus jaringan yang luas dengan memberikan perhatian khusus kepada mereka yang mampu berbuat sesuatu bagi organisasi.

b. Peranan yang bersifat informasional

Informasi merupakan aset organisasi yang kritikal sifatnya. Dikatakan demikian karena dewasa ini dan di masa yang akan datang sukar membayangkan adanya kegiatan organisasi yang dapat terlaksana dengan efisien dan efektif tanpa dukungan informasi yang mutakhir lengkap, dan dapat dipercaya karena diolah dengan baik. Peran tersebut mengambil tiga bentuk, yaitu, *pertama*, seorang manager adalah pemantau arus informasi yang terjadi dari dan kedalam organisasi.

Seorang manager selalu menerima berbagai informasi dan dalam dan luar organisasi. Bahkan juga informasi yang sebenarnya tidak harus ditujukan kepadanya, tetapi kepada orang lain dalam organisasi.

Dalam kaitan ini perlu ditekankan bahwa berkat kemajuan dan terobosan dalam bidang teknologi informasi, yang dihadapi oleh manajer dewasa ini ialah melimpahkan informasi yang diterimanya. *Kedua*, Peran sebagai pembagi informasi. Berbagai informasi yang diterima oleh seorang mungkin berguna dalam penyelenggaraan fungsi manajerialnya akan tetapi, mungkin pula untuk disalurkan kepada orang atau pihak lain dalam organisasi.

Peran ini menuntut pemahaman yang mendalam tentang makna informasi yang diterimanya, dan pengetahuan tentang berbagai fungsi yang harus diselenggarakan. Ketiga, peran selaku juru bicara organisasi. Peran ini memerlukan kemampuan menyalurkan informasi secara tepat karena berbagai pihak di luar organisasi, terutama jika menyangkut informasi tentang rencana, kebijaksanaan, tindakan, dan hasil yang telah dicapai oleh organisasi. Peranan ini juga menuntut pengetahuan yang mendalam tentang berbagai aspek industri yang ditanganinya. Peranan ini dapat dimainkan dengan berbagai cara seperti rapat umum tahunan pemegang saham, atau lebih terbatas dalam bentuk rapat dengan para anggota dewan komisaris perusahaan, negosiasi dengan instansi pemerintah, pemasok, dan sangat penting artinya dalam pembentukan dan pemeliharaan citra positif organisasi yang dipimpinnya.

c. Peranan pengambilan keputusan

Peran ini mengambil tiga bentuk suatu keputusan, yaitu sebagai berikut: *pertama* sebagai entrepreneur, seorang pemimpin diharapkan mampu mengkaji terus menerus situasi yang dihadapi oleh organisasi, untuk mencari dan menemukan peluang yang dapat dimanfaatkan, meskipun kajian itu sening menuntut terjadinya perubahan dalam organisasi.

Kedua, peredam gangguan. Peran ini antara lain kesediaan memikul tanggung jawab untuk mengambil keputusan tindakan kolektif apabila organisasi menghadapi gangguan serius yang apabila tidak ditangani akan berdampak negative pada organisasi. *ketiga*, pembagi sumber dana dan daya. Tidak jarang orang berpendapat bahwa, makin tinggi posisi managerial seseorang, wewenangpun makin besar. Wewenang atau kekuasaan paling sering menampakkan diri pada kekuasaan untuk mengalokasikan dana dan daya. Termasuk diantaranya wewenang untuk menetapkan orang pada posisi tertentu, wewenang mempromosikan orang, menurunkan pangkat. Kewenangan itulah membuat para bawahan bergantung kepadanya

Berdasarkan kajian teori yang mendukung tentang kepemimpinan maka dapat diambil pengertian yang dimaksud kepemimpinan adalah proses mempengaruhi, menggerakkan, memberikan motivasi, dan mengarahkan orang-orang yang ada dalam organisasi mencapai tujuan.

B. Pemerintahan Desa

1. Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan supra struktur lainnya. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak bisa dilepaskan dari pemahaman pengertian pemerintahan itu sendiri, dalam artian yang lebih luas Manan (2011: 89) mengungkapkan Pemerintahan pertama-tama diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi.

Dalam organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif dan jabatan supra struktur lainnya. Jabatan-jabatan ini menunjukkan suatu lingkungan kerja tetap yang berisi wewenang tertentu. kumpulan wewenang memberikan kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. karena itu jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan lain-lain sering juga disebut kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif dan lain-lain. pemerintahan yang dikemukakan di atas dapat disebut sebagai pemerintahan dalam arti umum atau dalam arti luas (*government in the broad sense*).

Dilihat dari kekuasaan pemerintahan daerah otonom, pemerintahan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok (Manan, 2011: 96) yaitu :

- a. Pemerintahan dalam arti sempit yaitu penyelenggaraan kekuasaan eksekutif atau administrasi negara.
- b. Pemerintahan dalam arti agak luas yaitu penyelenggaraan kekuasaan eksekutif dan legislatif tertentu yang melekat pada pemerintahan daerah otonom.
- c. Pemerintahan dalam arti luas yang mencakup semua lingkungan jabatan negara di bidang eksekutif, legislatif, dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan pengertian pemerintahan desa Maria, (2006: 111) menyatakan bahwa Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Konsep lain dikemukakan oleh Sutarjo, (2011: 188) yang secara konseptual menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Sistem Pemerintahan Desa, menyebutkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa

diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya, mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Pemerintah Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Nasional, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan desa diatur didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat di dalam pasal 23 yang bunyinya Pemerintahan Desa di selenggarakan oleh pemerintah Desa sedangkan pada Pasal 24 menyebutkan penyelenggaran pemerintahan desa berdasarkan asas

- a. Kepastian hukum.
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Tertib kepentingan umum.
- d. Keterbukaan.
- e. Proporsionalitas.
- f. Akuntabilitas.

- g. Efektivitas dan efisiensi.
- h. Kearifan lokal.
- i. Keberagaman. dan
- j. Partisipatif.

Mengingat pemerintahan desa sebagai organisasi pelayanan merupakan ujung tombak dari berhasil tidaknya penyelenggaraan pemerintah. Wasistiono (2006:12) mengemukakan bahwa keberadaan desa cukup penting antara lain:

- a. Desa merupakan ujung tombak dari penyelenggaraan pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Citra birokrasi pemerintahan secara keseluruhan akan banyak ditentukan oleh kinerja organisasi tersebut.
- b. Desa merupakan *line office* dari pemerintah pusat yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Kewenangan desa menurut Undang-Undang Nomor. 6 tahun 2014 tentang Desa adalah:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Fungsi desa menurut Undang-Undang Nomor. 6 tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut:

- a. Desa sebagai *hinterland* (pemasok kebutuhan bagi kota)
- b. Desa merupakan sumber tenaga kerja kasar bagi perkotaan
- c. Desa merupakan mitra bagi pembangunan kota
- d. Desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia

Wasistiono (2006: 82) berpendapat bahwa kelembagaan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik meliputi:

- a. Personil;

Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dicapai, jika ada keseimbangan antara beban tugas yang dihadapi dengan wadah berupa struktur organisasi. Struktur organisasi diisi oleh jumlah dan kualitas pegawai yang tepat, dan berkualitas.

- b. Anggaran;

Terpenuhinya anggaran dalam mendukung dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada publik

c. Sarana dan Prasarana.

Dukungan sarana dan prasarana baik dari segi kapasitas dan kauntitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga mendukung kegiatan pelaksanaan pekerjaan.

d. Pelayanan

Harapan yang diinginkan oleh masyarakat selaku pengguna jasa adalah dari sisi pelayanan (jarak, waktu dan personil), yaitu pelayanan yang cepat, tepat, birokrasi tidak berbelit belit, sehingga mampu memberikan kepuasan kepada publik.

Tugas dan kewenangan desa sesuai yakni mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kemudian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, dimana tugas pembantuan dari Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pemerintah desa juga memiliki tugas dan wewenang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan kehidupan demokrasi, melaksanakan prinsip tata pemerintah desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa, menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.

Pemerintah desa wajib menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa, melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa, membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat; memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa dan mengembangkan potensi sumber daya alam serta melestarikan lingkungan hidup.

C. Kepemimpinan Kepala Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus tugas kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 (1) dan Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 (1) menyatakan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain.

Selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintah desa tentu tidak lepas dari peran Kepala Desa. Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa, Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan kepala desa mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban. Tugas kepala desa menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan Wewenang kepala desa: kepala desa dalam menjalankan tugasnya mempunyai wewenang-wewenang yang harus dilaksanakan antara lain:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban kepala desa adalah seseorang yang sangat penting dalam suatu masyarakat desa, kepala desa menjadi patokan masyarakatnya dalam bertindak maka dari itu kepala desa harus benar-benar menjalankan kewajibannya agar masyarakatnya sejahtera. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.

- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat serta mengembangkan potensi sumber daya alam
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
- o. dan melestarikan lingkungan hidup.

Kepala desa akan membawa masyarakatnya dalam suatu kesejahteraan jika kepala desa bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya di atas, dan menjalankannya sesuai Undang-Undang yang berlaku. Kepala desa harus memperhatikan keadaan masyarakatnya, jangan sampai kepala desa mementingkan kepentingan pribadinya sendiri dan mengabaikan kepentingan umum atau kepentingan masyarakatnya.

Kinerja seorang kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa, dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan perekonomian masyarakat desa. Disisi lain, kepemimpinan kepala desa merupakan salah satu aspek yang menonjol dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa, karena tugas seorang pemimpin adalah mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi ini sesuai dengan pendapat Hasibuan (2009:170) “Kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi”.

Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa menurut Sudarmayanti. (2011: 126) yaitu:

- a. Peran Kepala Desa sebagai motivator, pendorong, penggerak atau seseorang yang memberikan motivasi untuk mencapai suatu tujuan agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kepala Desa selalu memberikan motivasi serta masukan-masukan dan dukungan dengan memberi semangat kepada aparatur pemerintah di Kantor Desa, selain dari pada itu Kepala Desa adalah seorang pemimpin yang mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi kepada masyarakat Desa. Dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan peran dari seorang kepala desa harus bisa memberikan kepuasan serta pelayanan yang baik bagi masyarakat desa, dengan adanya kewenangan yang dimiliki sebagai pimpinan pemerintahan di desa. Kepala desa tidak sekedar memfasilitasi masyarakat dengan pembangunan fisik tetapi juga melalui pembinaan mental dan spiritual.
- b. Peran Kepala Desa sebagai fasilitator, bahwa Kepala Desa menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam hal memfasilitasi atau melengkapi kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembangunan.
- c. Kepala Desa sebagai mediator, yaitu yang menentukan keberhasilan setiap program dan rancangan pembangunan yang telah di rencanakan oleh karena itu peran kepala desa sebagai mediator harus dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik hendaknya Kepala Desa wajib melibatkan masyarakat dalam setiap program pemerintahan, bentuk kebijakannya adalah setiap program yang telah direncanakan wajib di sosialisasikan kepada masyarakat. Selain itu kepala desa juga seharusnya berperan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi terhadap program-program yang dilakukan oleh pemerintah desa serta mampu menyusun kebijakan strategis yang melibatkan masyarakat, karena pada dasarnya masyarakat juga bagian dari suksesnya pelaksanaan program desa, masyarakat juga mempunyai peranan terhadap tercapainya tujuan dari pembangunan.

Kepemimpinan seorang kepala desa menentukan arah pembangunan desa itu sendiri. Pembangunan yang ada pada suatu desa harus mengikutsertakan masyarakat dan aparatur pemerintah lainnya. Pembangunan yang efektif dan efisien harus dapat mengakomodir kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Oleh karena itu Kepemimpinan kepala desa harus dapat mengikutsertakan aparatur pemerintah yang lain dan masyarakat yang ada di dalamnya demi terciptanya pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Kepala desa juga harus menjadi motor penggerak dalam pelayanan publik memberikan pelayanan prima kepada masyarakat baik dari segi kualitas maupun kuantitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka kepemimpinan kepala desa adalah kemampuan kepala desa dalam mempengaruhi masyarakat agar memperoleh dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan visi, misi dan tujuan pembangunan desa, yaitu dengan cara mengarahkan, membimbing, mengayomi, mengawasi serta melayani setiap kebutuhan publik/masyarakat.

D. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

1. Pengertian *Good Governance*

Good governance pertama kali di perkenalkan oleh *United Nations Development Program* (UNDP), sebab munculnya konsep ini di sebabkan oleh tidak terjadinya akuntabilitas, transparansi. Artinya banyak negara dunia ketiga ketika di beri bantuan dana tersebut banyak yang tidak tepat sasaran, sehingga negara maju enggan memberikan bantuan terhadap negara dunia ketiga adalah karena belum terciptanya sistem birokrasi yang efektif, efisien dan tidak adanya transparansi, akuntabilitas bantuan dana dari negara maju. Konsekuensinya banyak terjadi korupsi yang di lakukan oleh dunia ketiga ketika bantuan di turunkan oleh negara maju. *Good governance* dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Maksudnya baik yaitu pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber social, budaya, politik, serta ekonomi diatur sesuai dengan kekuasaan yang dilaksanakan masyarakat. sedangkan pemerintahan yang bersih adalah

pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab.

Seperti yang dipaparkan pada bagian sebelumnya, bahwa *good governance* merupakan sebuah cara mengenai tata kelola pemerintahan untuk menegasi model dinamika pembangunan dinegara dunia ketiga yang menempatkan peran pemerintah yang sangat dominan. Dalam penjelasan lebih lanjut, konsep *good governance* menekankan pentingnya Peranan setiap pihak dalam sebuah negara, baik itu pemerintah; masyarakat sipil; atupun swasta. Bahkan lebih dari itu, konsep ini menekankan pengurangan peran pemerintah dan peningkatan peran masyarakat sipil dan swasta dalam penentuan pembangunan suatu negara.

2. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Pendekatan atau cara yang digunakan setiap daerah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak sama, namun semua berorientasi pada masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan perbaikan sistem manajemen pemerintahan Dalam *good governance*, terdapat asas-asas yang perlu diperhatikan, yaitu : (Widodo, 2011:92) :

a. Partisipasi

Asas partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilan sah yang mewakiliaspirasi mereka. Bentuk partisipasi menyeluruh ini dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni

kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif.

b. Transparansi

Asas ini merupakan unsur lain yang menopang terwujudnya *good governance*. Menurut para ahli, jika tidak ada prinsip ini, bisa menimbulkan tindakan korupsi. Ada 8 unsur yang harus diterapkan transparansi yaitu : penetapan posisi/jabatan/kedudukan, kekayaan pejabat public, pemberian penghargaan, penetapan kebijakan, kesehatan, moralitas pejabat dan aparatur pelayanan masyarakat, keamanan dan ketertiban, serta kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat.

c. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya wewenang untuk mengurus kepentingan mereka. Setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat

Tata pemerintahan desa tidaklah terbatas pada bagaimana pemerintahan desa menjalankan wewenangnya dengan baik semata, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dan mengontrol pemerintahan desa untuk menjalankan wewenang tersebut dengan baik (*accountable*). Laode, (2010: 75) seringkali tata pemerintahan yang baik dipandang sebagai “sebuah bangunan dengan 3 tiang”. Ketiga tiang penyangga itu adalah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

a. Transparansi

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait seperti berbagai peraturan desa, peraturan kepala desa, serta kebijakan pemerintahan desa dengan biaya yang minimal. Artinya, transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan (untuk kemudian) dapat dipantau. Transparansi jelas mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik.

Sebab, penyebaran berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintahan desa dapat memberikan kesempatan kepada berbagai komponen masyarakat untuk turut mengambil keputusan. Oleh karenanya, perlu dicatat bahwa informasi ini bukan sekedar tersedia, tapi juga relevan dan bisa dipahami publik (masyarakat desa). Selain itu, transparansi ini dapat membantu untuk mempersempit peluang korupsi di kalangan pemerintahan desa (BPD, Kepala Desa dan perangkat desa lainnya) dengan “terlihatnya” segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat luas.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas atau *accountability* adalah kapasitas suatu institusi pemerintahan desa untuk bertanggungjawab atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Dalam konteks pemerintahan desa, setiap institusi pemerintahan desa (Pemerintah

Desa dan BPD) mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian organisasinya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, sampai pada pemantauan dan evaluasi.

Dalam penelitian ini teori yang penulis gunakan mengutip pendapat Suprijadi (2015: 113) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik seorang pemimpin harus menerapkan asas-asas yang meliputi antara lain:

1. Penerapan asas akuntabilitas (*accountability*)

Penerapan asas akuntabilitas (*accountability*) yang di artikan sebagai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya. Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat. Inilah yang dituntut dalam asas akuntabilitas dalam upaya menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Raharjo, 2013: 85).

Unsur-unsur pendukung akuntabilitas meliputi:

- a. Penetapan tujuan dan sasaran yang jelas, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Rencana tata kelola harus mengandung visi dan misi yang jelas, sebagai acuan untuk menyusun tujuan dan sasaran tata kelola

- b. Struktur kelembagaan yang solid untuk mendorong terwujudnya sistem manajemen yang efisien dan efektif guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- c. Penetapan kebijakan yang jelas dan terarah, konsisten dengan tujuan organisasi, tertulis, dan transparan.
- d. Perencanaan yang realistis, terinci dan sesuai dengan kebutuhan, transparan dan partisipatif, akomodatif terhadap sosial budaya masyarakat setempat, dan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh pemangku kebijakan .
- e. Penetapan prosedur kerja yang tepat dan jelas, mudah dilaksanakan, mudah dimengerti dan transparan, serta mempertimbangkan peraturan perundangan yang terkait.
- f. Pelaksanaan Kegiatan yang efektif dan efisien, tertib administrasi, transparan, baik dalam pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset negara, pengelolaan barang inventaris, pengelolaan barang persediaan, maupun pengelolaan barang bantuan.
- g. Sistem Pencatatan yang jelas, akurat dan sederhana. Laporan pelaksanaan (akuntabilitas kinerja) tata kelola akan mengacu pada prinsip-prinsip obyektifitas, transparansi, akurasi yang tinggi, serta profesionalisme yang dapat diandalkan.

2. Penerapan asas keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*)

Penerapan asas keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*) dalam arti masyarakat tidak hanya dapat mengakses suatu kebijakan tetapi juga ikut berperan dalam proses perumusannya. Transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Keterbukaan dan transparansi dapat juga diartikan sebagai proses keterbukaan untuk menyampaikan aktivitas yang dilakukan sehingga pihak luar (termasuk masyarakat lokal/adat, pelaku usaha, maupun instansi pemerintah lain) dapat mengawasi dan memperhatikan aktivitas tersebut.

Memfasilitasi akses informasi merupakan hal yang terpenting untuk menginformasikan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Komponen transparansi mencakup komprehensifnya informasi, ketepatan waktu dalam pelayanan informasi, ketersediaan informasi bagi publik, dan adanya upaya untuk memastikan sampainya informasi kepada kelompok rentan.

3. Penerapan asas partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan. Asas partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah yang

mewakili kepentingan mereka. Secara umum Conyer dalam Soetomo (2006: 66), mengemukakan pengertian partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat secara sukarela yang didasari oleh determinan dan kesadaran diri masyarakat itu sendiri dalam mensukseskan program pembangunan. Empat macam bentuk partisipasi masyarakat dalam perannya guna mensukseskan tata kelola pemerintahan, yaitu:

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.
- c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan.
- d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan.

Secara umum Pariatra Westra (Astuti, 2008: 14) menyebutkan manfaat partisipasi adalah:

- a. Lebih mengemukakan diperolehnya keputusan yang benar.
- b. Dapat digunakan kemampuan berpikir kreatif dari para anggotanya.
- c. Dapat mengendalikan nilai-nilai martabat manusia, motivasi serta membangun kepentingan bersama.
- d. Lebih mendorong orang untuk bertanggung jawab.
- e. Lebih memungkinkan untuk mengikuti perubahan.

4. Penerapan asas Responsif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik

Asas responsif adalah dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Pelayanan publik menurut Pamudji (2007:55) adalah berbagai kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang barang dan jasa. Pengertian pelayanan publik menurut Purnama (2006: 98) adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang ditetapkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah: kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Ada 14 unsur yang menjadi dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat, yaitu (Lukman, 2000:55)

- a. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;

- b. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
- c. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
- d. Kedisiplinan petugas pelayanan, kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
- f. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
- g. Kecepatan pelayanan, yaitu target pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
- h. Keadilan mendapatkan pelayanan; yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
- i. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;

- j. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
- k. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
- l. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- m. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
- n. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

3. Karakteristik dan Syarat Tata Kelola Pemerintah yang Baik

Konsep tata pemerintahan tentunya tidak hanya perlu diaplikasikan di tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota, tetapi bahkan lebih penting lagi adalah di tingkat desa. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang untuk konteks desa diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan perwujudan salah satu prasyarat yang dibutuhkan, tetapi bukan berarti bahwa regulasi ini sudah mencukupi bagi terwujudnya tata

pemerintahan desa yang baik. Laode (2010: 65) berpendapat tatakelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut.

- a. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosio-ekonomi.
- b. Komunikasi, adanya jaringan multisistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan *output* yang berkualitas.
- c. Proses penguatan diri sendiri (*self enforcing process*), ada upaya untuk mendirikan pemerintah (*self governing*) dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi.
- d. Keseimbangan kekuatan (*balance of force*), dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerja sama.⁵
- e. Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi.

Hasil studi ini Widodo (2011:89) juga berhasil mengidentifikasi faktor yang menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, yaitu:

- a. Komitmen pimpinan. Adalah konsistensi pimpinan tertinggi di daerah yang bersungguh-sungguh melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan di lingkungannya. Pimpinan berfungsi menjadi penggerak segala bentuk perubahan dan menjadi pelopor dalam pelaksanaannya.
- b. Dasar hukum yang kuat. Setiap pelaksanaan kebijakan dalam rangka perbaikan sistem tata kelola pemerintahan yang baik, harus memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam bentuk Peraturan atau Keputusan Kepala Daerah maupun Peraturan Daerah (Perda). Dengan dasar hukum Perda, walaupun terjadi pergantian pimpinan daerah, kebijakan masih akan tetap berjalan.
- c. Dukungan dari lingkungan internal dan masyarakat. Dukungan internal dan masyarakat atas kebijakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan karena kebijakan tersebut diciptakan, dikelola dan diperuntukkan bagi mereka.
- d. Inisiatif internal. Dorongan bagi timbulnya gagasan/inisiatif untuk memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan yang baik idealnya muncul dari gagasan-gagasan internal jajaran pegawai maupun pimpinan yang berada di lingkungan pemerintah yang bersangkutan. Perbaikan sistem yang didasarkan pada pendekatan persuasif dan musyawarah para pengambil kebijakan daerah, yang kemudian disosialisasikan ke seluruh jajarannya akan menghasilkan dukungan dan komitmen yang tinggi bagi seluruh staf

Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok *good governance*, menurut Manan (2004: 87) setidaknya dapat dilakukan melalui prioritas program :

- a. Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan
- b. Kemandirian lembaga peradilan
- c. Profesionalitas dan integritas aparatur pemerinrtah
- d. Penguatan partisipasi masyarakatmadani, dan
- e. Peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah, pencapaian tingkat kesejahteraan dapat diwujudkan secara lebih tepat yang pada akhirnya akan mendorong kemandirian masyarakat.

Dalam berbagai dokumen dan tulisan yang berkaitan dengan tata pemerintahan disebutkan bahwa ciri penting tata pemerintahan meliputi hal-hal sebagai berikut (Barori: 2016:80) :

- a. Memperhatikan kepentingan kaum paling miskin dan lemah [khususnya, berkaitan dengan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya pembangunan].
- b. Prioritas politik sosial dan ekonomi dibangun diatas dasar konsensus.
- c. Mengikutsertakan semua kepentingan di dalam merencanakan dan merumuskan suatu kebijakan.
- d. Transparansi dan pertanggung jawaban menjadi bagaian inheren di dalam seluruh sikap dan prilaku kekuasaannya.
- e. Birokrasi pemerintahan dilakukan dengan efektif, efesien dan adil.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama tentang sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang.

E. Kerangka Pikir

Desa Gunungrejo merupakan salah satu desa yang berada di dalam wilayah Kecamatan Way Ratai kabupaten Pesawaran, seperti halnya desa lain Gunungrejo juga memiliki sejarah dan perkembangan tersendiri. Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung meraih juara pertama nasional Lomba Desa Tingkat Nasional Regional I Wilayah Sumatera.

Kesuksesan Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dalam meraih juara pertama nasional Lomba Desa Tingkat Nasional Regional I Wilayah Sumatera Tahun 2017 dikarenakan desa tersebut telah masuk dalam kategori desa maju dan telah memuat kriteria sebagaimana yang menjadi instrumen penilaian desa yang tertuang dalam permendagri.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tentu tidak lepas dari peran kepala desa selaku ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan sekaligus selaku pemangku kebijakan di tingkat desa. Kepala Desa adalah pemimpin yang dipilih secara demokrasi maupun secara tradisional oleh warga yang mana ia adalah wakil perpanjangan tangan dari masyarakat

untuk dapat mengatur, menjaga dan memotivasi warganya dalam proses pembangunan di desa. Kepemimpinan Kepala Desa sangatlah berpengaruh terhadap maju-mundurnya dan berkembang atau tidak berkembangnya suatu pembangunan di desa.

Adapun kepemimpinan yang dapat diterapkan kepala desa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah seperti yang dikemukakan oleh Suprijadi (2015: 113) meliputi antara lain:

1. Penerapan Asas Akuntabilitas (*accountability*)

Kepemimpinan kepala desa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik harus menerapkan asas akuntabilitas (*accountability*) dengan kata lain dalam pengelolaan keuangan desa harus akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, sehingga pemerintah desa terbebas dari penyimpangan-penyimpangan dan praktek tindak pidana korupsi.

2. Penerapan asas keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*)

Kepemimpinan kepala desa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik harus menerapkan asas keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*) dengan kata lain kepala desa dalam melaksanakan kebijakan apapun di desa harus bersikap terbuka dan transparan kepada masyarakat, pemerintah desa khususnya kepala desa berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya

yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak– pihak yang berkepentingan.

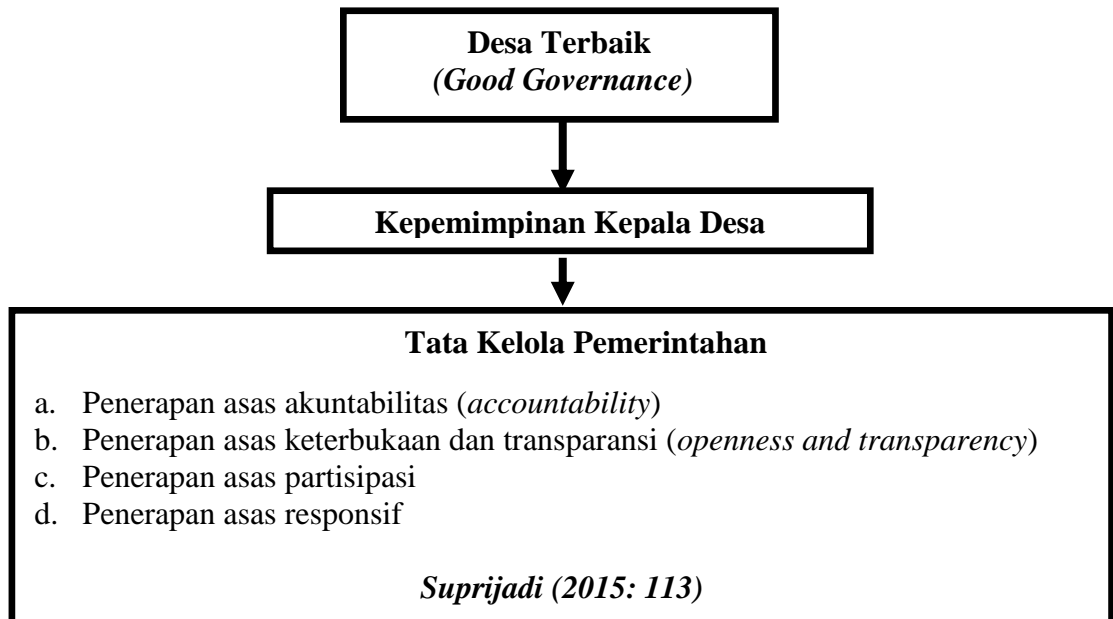
3. Penerapan asas partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan

Kepemimpinan kepala desa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik harus menerapkan asas partisipasi masyarakat dengan kata lain kepala desa harus melibatkan masyarakat dalam program-program pemerintah desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, masyarakat hendaknya dilibatkan sebagai aktor dan bukan sebagai penonton, karena pada dasarnya yang mengetahui prioritas kebutuhan yang diinginkan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri, dengan melibatkan masyarakat maka program-program yang dihasilkan dapat menyentuh kepentingan publik, tepat guna dan tepat sasaran.

4. Penerapan asas Responsif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik

Kepemimpinan kepala desa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik harus menerapkan asas responsif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan kata lain kepala desa harus cepat bertindak, memberikan pelayanan secara cepat dan tepat, birokrasi pelayanan yang tidak berbelit-belit, dengan adanya pelayanan prima tersebut diharapkan kepuasan publik terhadap pelayanan dapat lebih meningkat.

Maka dari itu peneliti dapat menggambarkan kepemimpinan kepala desa Gunungrejo dalam Tata Kelola Pemerintahan sehingga menjadi desa terbaik dengan menggunakan kerangka pikir sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sugiono (2013:9) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada *filsafat postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi

Denzim dan Lincoln (Moleong,2014:5) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud manafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. David Williams (Moleong,2014:5) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada sebuah latar alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Alasan peneliti hanya menggunakan jenis penelitian kualitatif adalah dikarenakan dalam menganalisa hasil penelitian hanya bersifat mendiskripsikan atau menggambar kan suatu fenomena dengan alat ukur

wawancara, yaitu untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis bagaimana kepemimpinan kepala desa Gunungrejo sehingga Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran menjadi desa terbaik.

B. Fokus Penelitian

Moleong (2014:92-93) mengatakan masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Fokus penelitian merupakan masalah pokok yang menjadi sasaran utama dalam sebuah penelitian ilmiah. Untuk memahami lebih luas dan mendalam maka diperlukan pemilihan fokus penelitian. Pada dasarnya, fokus penelitian dapat bersumber dari pengalaman penuli sendiri, berita yang sedang hangat dibicarakan ataupun melalui kepustakaan ilmiah. Penelitian kualitatif menetapkan fokus guna mempertajam penelitian. Pada penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam skripsi lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).

Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana kepemimpinan kepala desa Gunungrejo sehingga Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran menjadi desa terbaik.

Tabel 3. Fokus Penelitian

Kepemimpinan kepala desa dalam Tata Kelola Pemerintahan	Fokus Penelitian
Penerapan asas akuntabilitas (<i>accountability</i>)	Indikator dalam penerapan asas akuntabilitas (<i>accountability</i>) meliputi (a), akuntabilitas keuangan: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran (b) Akuntabilitas administrasi perkantoran: struktur organisasi.
Penerapan asas keterbukaan dan transparansi (<i>openness and transparency</i>)	Indikator dalam penerapan asas keterbukaan dan transparansi meliputi: (a) Memanfaatkan kecanggihan teknologi, dengan mempublikasikan penggunaan anggaran melalui situs/web dan media sosial lainnya b) Kepala desa rutin mengadakan rapat tahunan yang di selenggarakan pada awal tahun dan akhir tahun (c) Mempublikasikan anggaran melalui papan informasi dan Baleho di depan balai Desa.
Penerapan asas partisipasi	Indikator dalam penerapan asas partisipasi meliputi: (a) Melibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. (b) Membentuk Badan Usaha Miliki Desa (BUMD) (c) Membuat jadwal ronda keliling (d) mengadakan kegiatan keagamaan (pengajian rutin)
Penerapan asas responsif	Indikator dalam penerapan asas responsif meliputi: (a) Menyediakan fasilitas kerja, sarana-parasana pelayanan (b) Menerapkan sikap empati (masyarakat adalah raja) (c) Menyediakan loket pelayanan dilengkapi nomor antrian (d) Menyediakan papan informasi tentang biaya pelayanan (e) Menyediakan kotak saran dan mempublikasikan nomor HP pengaduan.

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2018)

C. Lokasi Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian yang di pilih dalam penelitian ini di pilih dengan pertimbangan bahwa lokasi dan waktu yang diambil akan membantu penulis memahami masalah penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat yang menjadi obyek dalam sebuah penelitian. Lokasi penelitian menjadi lokasi sasaran guna mendapatkan data yang dibutuhkan di dalam penelitian kualitatif. Terkait penelitian ini, lokasi penelitian ditentukan dan dipilih dengan sengaja untuk mendapatkan data yang diburuhkan oleh peneliti. Guna mendapatkan data yang dibutuhkan lokasi penelitian ini bertempat di Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

D. Jenis Data

Lofland dan Lofland (Moleong,2014:157) mengatakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Guna mempertajam penelitian ini maka perlu didukung oleh adanya data yang bersifat akurat dan juga lengkap. Oleh sebab itu, jenis data yang digunakan dalam penelitian meliputi :

1. Data primer

Sekaran (Silalahi,2012:289) mengatakan data primer adalah objek atau dokumen original-material mentah dari pelaku yang disebut "*first-hand information*" sedangkan, Sarwono (2006:129) mengatakan data primer ialah data yang bersal dari sumber pertama. Jadi, data primer adalah yang dikumpulkan dari situasi aktual atau ketika peristiwa terjadi.

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Data primer pada penelitian ini berasal dari wawancara baik wawancara terstruktur maupun mendalam kepada beberapa informan yang sebelumnya telah ditentukan, dalam penelitian ini informan adalah Kepala Desa 1 orang, Sekertaris Desa 1 orang, Masyarakat desa 6 orang, aparat desa 2 orang, sehingga jumlah informan berjumlah 10 orang. Alasan mengambil ke 10 informan ini untuk dimintai keterangan karena 10 orang informan ini memiliki keterkaitan langsung dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa

2. Data sekunder

Sarwono (2006:123) mengatakan data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga data diperoleh dengan mudah dan cepat, misalnya di perpustakaan, perusahaan, biro pusat statistik, dan organisasi perdagangan. Sugiyono (2014:225) mengatakan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada yang digunakan sebagai data pendukung dari data primer agar data yang didapatkan lebih akurat dan lengkap.

Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari buku atau literature yang berhubungan dengan pembahasan dan penelitian yang berdasarkan data penunjang lain yang kaitannya dengan permasalahan

yang diteliti. Adapun buku-buku atau literature yang dipakai dalam penelitian ini adalah buku-buku yang memiliki teori Tata Kelola Pemerintahan (*good governance*) buku-buku pembangunan partisipasi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

E. Teknik Penentuan Informan

Informan dalam penelitian merupakan orang yang memiliki informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh penulis dalam proses pengumpulan data.

Nasution (Sugiono,2014:223) mengatakan :

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatu belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai satu-satunya yang dapat mencapainya.”

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* guna menetapkan informan. Sugiono (2014:218-219) mengatakan *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut di anggap paling tahu tentang apa yang diharapkan. Dengan menentukan terlebih dahulu responden atau narasumber yang akan diwawancarai yang ditetapkan secara sengaja, dengan anggapan bahwa sampel yang diambil itu merupakan keterwakilan (*refresentatif*) bagi peneliti, sehingga pengumpulan data yang

langsung pada sumber datanya dapat dilakukan secara proposional demi keakuratan penelitian.

Tabel 4. Jumlah Informan

No	Jabatan Informan	Jumlah
1	Kepala Desa Gunungrejo	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Masyarakat Desa Gunungrejo	6
4	Aparat Desa Gunungrejo	2
Total Informan		10 orang

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2018)

F. Teknik Pengumpulan Data

Sugiono (2014:224) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian ini adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah). Oleh sebab itu, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data guna mendapatkan sejumlah informasi yang dibutuhkan, diantaranya :

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Adapun target yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah : Kepala Desa, Masyarakat, Aparat Desa. Tujuan wawancara secara mendalam ini adalah untuk

mendapatkan informasi secara mendalam tentang sejauhmana kepemimpinan kepala desa Gunungrejo dalam Tata Kelola Pemerintahan pada Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran baik dalam penerapan asas akuntabilitas (*accountability*), penerapan asas keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*), penerapan asas partisipasi dan penerapan asas responsif.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu penyelidikan yang menggunakan sumber-sumber dokumentasi untuk mendapatkan data yang diperlukan. Adapun target dokumentasi yang akan penulis gali adalah dokumentasi pada saat musrenbang, dokumentasi pada saat pelaksanaan program pembangunan, profil desa, dengan tujuan untuk memperkuat hasil penelitian. Adapun data yang penulis peroleh dari dokumentasi ini adalah, data mengenai daftar hadir musrenbang, data pengelolaan keuangan.

3. Observasi

Observasi adalah mengadakan penelitian langsung dengan cara pengamatan kepada objek penelitian untuk memperoleh data-data Informatika yang akurat. Adapun data yang penulis peroleh dari observasi ini adalah,. gambaran kepemimpinan kepala desa Gunungrejo dalam Tata Kelola Pemerintahan pada Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

G. Teknik Analisa Data

Data yang di olah selanjutnya akan melalui tahapan analisis secara deskriptif agar mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Miles dan Huberman (Sugiono,2014:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaksi dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah penuh. Teknis analisis data disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan dilapangan meliputi :

1. Reduksi data

Yaitu proses pemilihan, pemusatan penelitian pada penyederhanaan, dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dari lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik. Reduksi data penulis lakukan pada data hasil wawancara, dalam hal ini penulis memilih kata-kata yang bisa digunakan untuk melakukan pembahasan serta menggunakan teori-teori untuk menganalisis fokus dalam penelitian ini.

2. Penyajian data

Yaitu penulis menampilkan sekumpulan informasi tersusun berdasarkan data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian, yang memberi kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan

3. Menarik kesimpulan

Merupakan bagian satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohan dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Setelah data-data tersebut diuji kebenarannya penulis kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut. Proses analisis yang penulis lakukan adalah dengan mengacu pada kerangka pikir yang telah dirumuskan

H. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan cara menyelaraskan antara data yang dilaporkan Peneliti dengan data yang terjadi pada obyek penelitian (Sugiyono, 2012: 274). Dalam menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi data.

Triangulasi data dilakukan untuk menguji kebenaran dan keabsahan data. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara mencocokkan data yang didapat melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang didapat dari hasil wawancara dengan seluruh informan pihak kemudian di analisis dan dicocokkan dengan data-data yang didapat melalui dokumentasi. Melalui triangulasi data, maka diperoleh informasi yang valid dan jelas mengenai Kepemimpinan Kepala Desa Gunungrejo Dalam Tata Kelola Pemerintahan Menjadi Desa Terbaik.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Gunung Rejo

1. Sejarah Singkat Desa Gunungrejo

Desa Gunungrejo merupakan salah satu desa yang berada di dalam wilayah Kecamatan Way Ratai kabupaten Pesawaran, seperti halnya desa lain Gunungrejo juga memiliki sejarah dan perkembangan tersendiri. Gunungrejo awalnya merupakan salah satu pedukuhan di wilayah Desa Wates way ratai yang terkenal dengan nama Anglo (nama Afdeling wilayah kerja perkebunan karet Way ratai), pada tanggal 23 Oktober 1986 Dusun Gunungrejo resmi di mekarkan menjadi Desa persiapan Gunungrejo yang terdiri dari 12 Dusun yaitu Kalipasir I, Kalipasir II, Gunungrejo, Kaliawi, Fajarbulan, Gunungsari, Lebaksari, Tamansari, Totoharjo, Merawan, Sidorejo dan Candipuro. Pada tahun 2013, Desa Gunungrejo dimekarkan menjadi 3 desa yaitu Desa Gunungrejo, Desa Mulyosari dan Desa Poncorejo.

2. Kependudukan Desa Gunungrejo

Jumlah penduduk desa mencapai 2.526 jiwa, yang terdiri dari 1.301 jiwa laki-laki dan 1.225 jiwa perempuan. Mayoritas penduduk desa 94% beragama Islam, sisanya beraga Kristen dan Hindu. Letak geografis desa Gunungrejo yang berupa bukit dan lembah menyebabkan 80% mata pencaharian masyarakat mayoritas mengolah bukit dan lembah dengan cara bertani sisanya bekerja sebagai PNS dan wiraswasta. Profesi petani juga merupakan pekerjaan turun menurun dari orang tua dan generasi sebelum mereka sehingga lebih mudah dipelajari dan diterapkan, hal lain yang menjadi penyebab mayoritas masyarakat berprofesi petani adalah terbatasnya keterampilan (*life skill*) yang mereka miliki. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Gunungrejo masih sangat rendah, hal ini disebabkan karena letak sekolah lanjutan yang jauh, kondisi ekonomi masyarakat yang kurang baik dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih sangat rendah

3. Kepemerintahan Desa Gunungrejo

Visi pembangunan Desa Gunungrejo disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran yakni “Terwujudnya Kabupaten Pesawaran yang Tumbuh dan Berkembang Menuju Masyarakat yang Sejahtera dan Berdaya Saing”.

Misi pembangunan Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan non formal berupa pelatihan, penyuluhan maupun kursus pertanian, peternakan dan kerajinan pada kelompok tan.
- b. Mewujudkan kondisi desa yang aman, tertib, tentram dan damai serta memperkokoh persatuan dan kerukunan antar warga.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa.
- d. Menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.

Dalam melaksanakan tugas maupun visi dan misi, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris sebagai unsur staf atau pelayanan, kepala-kepala urusan sebagai unsur pelaksana teknis lapangan dan kepala-kepala Dusun sebagai unsur pelaksana wilayah. Susunan personalia Pemerintah Desa terdiri dari jabatan-jabatan yang tersusunan kedalam organisasi dan kerjasama Pemerintah Desa.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Gunungrejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

Kepemimpinan desa Gunungrejo mengalami pergantian dari tahun ke tahun dimana pada tahun 1990 Kepala desa di jabat oleh pejabat sementara pak Samsuri sampai bulan September 1992. Pada akhir desember 1992 desa Gunungrejo melaksanakan pemilihan Kepala Desa

yang pertama, secara kronologis Jabatan Kepala Desa Gunungrejo adalah sebagai berikut:

- h. Tahun 1986 sampai dengan tahun 1990 di jabat oleh bapak Basnu.
- i. Tahun 1990 sampai dengan tahun 1992 di jabat oleh bapak Samsuri.
- j. Tahun 1992 sampai dengan tahun 1994 di jabat oleh bapak Suwardi.
- k. Tahun 1994 sampai dengan tahun 2002 di jabat oleh bapak Mulyanto.
- l. Tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 di jabat oleh bapak Rudi.
- m. Tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 di jabat oleh bapak Suranto.
- n. Tahun 2014 sampai sekarang kembali di jabat oleh bapak Suranto.

Susunan Organisasi Pemerintahan Desa, Desa Gunungrejo Kecamatan

Way Ratai Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung :

- 1) Kepala Desa : Suranto, S.T
- 2) Sekertaris Desa : Munardi,S.Pd.I
- 3) Kaur Tu & Umum : Maya Umayati, S.Kom
- 4) Kaur Keuangan : Andri Suryawan
- 5) Kaur Perencanaan : Eko Yuliono
- 6) Kasi Pemerintahan : Nano Suparno
- 7) Kasi Kesejahteraan : Sutikno
- 8) Kasi Pelayanan : Maratus Sholihah, A.M.D

- 9) Kepala Dusun
 - a. Kepala Dusun 01 : Ansori
 - b. Kepala Dusun 02 : Sugiono
 - c. Kepala Dusun 03 : Nurudin
 - d. Kepala Dusun 04 : Nakim
 - e. Kepala Dusun 05 : Iwan. H.
 - f. Kepala Dusun 06 : Srinoto
 - g. Kepala Dusun 07 : Subandi
 - h. Kepala Dusun 08 : Nur Kholis
 - i. Kepala Dusun 02 : Teguh

4. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Gunungrejo

Aparatur Desa Gunungrejo dalam penyelenggaraan pemerintahan desa telah melakukan sistem pemerintahan berbasis Good Governance (pemerintahan yang baik) sesuai dengan misi yang ditetapkan Desa Gunungrejo yaitu pada bagian (d) Menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis, tidak hanya itu semua misi yang telah ditetapkan telah dijalankan dengan baik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa:

Tabel 5. Implementasi Sistem Good Governance Desa Gunungrejo

No	Sistem Good Governance	Implementasi
1	Asas Akuntabilitas	<p>Beberapa penerapan asas akuntabilitas yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Gunungrejo, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala desa memerintahkan kepada seluruh aparatur desa untuk melengkapi administrasi perkantoran mulai dari struktur organisasi, profil desa, dokumen perencanaan dan kelengkapan profil desa sesuai permendagri yang berlaku. b. Kepala desa menekankan kepada seluruh aparatur desa mengelola keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, sehingga pemerintah desa terbebas dari penyimpangan. c. Kepala desa telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan pada akhir tahun, untuk diberikan kepada pemerintah daerah dan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui secara detail tentang pengelolaan keuangan yang sudah digunakan. d. Kepala desa menekankan kepada seluruh aparat pemerintah desa untuk selalu melengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai bukti riil transaksi belanja, membayar pajak, dan melengkapi kelengkapan administrasi lainnya agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, disiplin dalam mengumpulkan bukti-bukti penggunaan anggaran setiap tahunnya. e. Kepala desa rutin mengirimkan aparat desa untuk mengikuti seminar, diklat, bimtek yang berkaitan dengan tata cara pengelolaan dana desa, baik yang diadakan institusi formal maupun informal. f. Kepala desa telah melibatkan serta menghimbau kepada seluruh masyarakat desa untuk bersama-sama membantu mengawasi kinerja pemerintahan desa dalam menggunakan anggaran.

2	Asas Keterbukaan dan Transparansi	<p>Pemerintah desa selalu menerapkan asas keterbukaan dan transparansi, penerapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala desa rutin mengadakan rapat atau musyawarah, selain itu seluruh pelaksanaan program kegiatan dan nominal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) baik yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di tempel secara rinci pada papan informasi di kantor desa, selain itu kesediaan dan aksesibilitas dokumen yang disediakan oleh pemerintah Desa Gunungrejo sehingga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. 2) Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan. 3) Adanya laporan berkala mengenai sumber daya dalam pembangunan proyek yang dapat diakses oleh umum.
3	Asas Partisipasi	<p>Pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat dalam melakukan semua kegiatan pemerintah desa, penerapan asas partisipasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap ada perencanaan, program kegiatan desa kepala desa sudah berusaha melibatkan partisipasi masyarakat, aparat desa khususnya kepala desa, mereka tidak bertindak sendiri, selalu menyampaikan kepada masyarakat, melalui acara musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dan melakukan penjangkauan aspirasi masyarakat. 2) Dalam pelaksanaan program kegiatan, kepala desa selalu melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. 3) Kepala desa telah melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam memanfaatkan hasil pembangunan., dengan tujuan dalam rangka menjaga kelestarian hasil pembangunan. 4) Dalam rangka mengembangkan inovasi dan produk unggulan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, maka kepala desa gencar melibatkan partisipasi masyarakat dengan membentuk Badan Usaha Miliki Desa (BUMD) yaitu penanaman sayur di polybag, budidaya ikan lele dan pengembangan kambing etawa.

4	Asas Responsif	<p>Aparatur desa selalu melaksanakan asas responsif sebagai tuntutan menjadi pemerintahan yang baik, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala desa sudah berusaha menyediakan fasilitas kerja, sarana-parasana untuk mendukung pelayanan, misalnya saja menyediakan fasilitas ruang tunggu yang nyaman dan aman dengan dilengkapi pendingin udara serta kursi tunggu yang kapasitasnya memadai, pemenuhan komputer, printer sehingga tidak menghambat proses pelayanan, sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap publik selaku pengguna jasa b. Kepala desa sudah menyediakan loket pelayanan yang dilengkapi nomor antrian, papan informasi tentang biaya pelayanan, dan staf desa yang selalu <i>standby</i> dalam memenuhi kebutuhan publik. c. Kepala desa selalu mengingatkan kepada seluruh aparat pemerintah desa untuk memberikan pelayanan yang ekstra dan prima, pelayanan yang responsif, cepat, tepat, mutlak. d. Kepala desa menyediakan kotak saran dan mempublikasikan nomor HP kepada masyarakat, jika terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan aparat desa.
---	----------------	--

Sumber: Diolah Peneliti (2018)

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepala Desa Gunung Rejo telah menerapkan asas akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa dalam mengelola kelengkapan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
2. Kepala Desa Gunungrejo sudah menerapkan asas keterbukaan dan transparansi. Kepala Desa melibatkan masyarakat dalam setiap program desa seperti Musrembangdes. Selain itu seluruh pelaksanaan program kegiatan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dipublikasikan secara rinci.
3. Kepala Desa Gunungrejo sudah menerapkan asas partisipasi. Kepala Desa melibatkan masyarakat dalam membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
4. Kepala Desa Gunungrejo sudah menerapkan asas responsif. Kepala desa melengkapi sarana dan prasarana.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Tata kelola pemerintahan di Desa Gunungrejo sudah menerapkan asas-asas *Good Governance* dalam penerapannya, bahkan sudah mendapatkan predikat baik dalam memberikan asas keterbukaan dan transparansi. Namun lebih baik jika pemerintah desa terbuka terhadap investor (swasta) untuk saling bersinergi melakukan pembangunan desa bersama-sama dan memanfaatkan potensi desa yang ada.
2. Desa Gunungrejo dapat bekerjasama dengan aparatur desa lain untuk dapat menerapkan hal serupa didesa yang masih dalam kategori desa terbelakang untuk meningkatkan dari segi pelayanan, mutu dan pemanfaatan teknologi dan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini, 2001, *Metodologi Penelitian*. Cetakan 3. Jakarta Ghalia Indonesia.
- Barori, Mohamad, 2016, *Tata Kelola Desa II*, Yogyakarta, STPMD “APMD”, Pres.
- Didjaja, Mustopa. 2013. *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Febriyanto, Irma Irawati, 2016, *Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Studi Di Desa Gunggung Kecamatan Batuan Sumenep)*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kutai Kartanegara.
- Gibson, 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Bahasa Indonesia)*. Jakarta. PT Prenhalindo.
- Halim, A, 2011,. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik, Cetakan Kedua*, Jakarta, Ghalla Indonesia.
- Hendra, 2005, *Pembangunan Pedesaan dari Bawah dan Partisipasi. Masyarakat*. Jakarta, Media Baru.
- Herujito, Y.M. 2005 *.Leadership*. Jakarta, PT Glora Aksara Pratama.
- Hetifah, Sumarto, 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Johnson dan Scholes, 2011, *Exploring Corporate Strategy*, Bandung, Informatika.
- Kartono, Kartini. 2013. *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Lalolo, Krina Loina. 2013. *Indikator Alat Ukur Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencana Pembangunan Nasional

- Laode, Ida, 2010, *Negara Mafia*, Jakarta, Galang Press.
- Lugiarti, 2004, *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Program Pengembangan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Manan, Bagir, 2004, *Good Governance, dalam Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Jakarta, Pusat Studi Hukum UII.
- Mardiasmo, 2009, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Morrisey, 2015, *Strategic Management*, Bandung, CV. Remaja Rosdakarya.
- Mosley, 2002, *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, 2005, *Manajemen Kualitas: Perspektif Global*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Nova Sulastri, 2016, *Peran Kepala Desa dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna*, Jurnal, vol. 128, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Jakarta.
- Rangkuti, 2011, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka.
- Rasul, Syahrudin. 2012. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.
- Sajogyo, 2001. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta, Andi Offset.
- Salusu, J, 2006, *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, Grasindo Jakarta.
- Siagian, Sondang, 2011, *Sistem Manajemen Kerja*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soetomo, 2006, *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarmayanti. 2011. *Membangun dan Mengembangkan Kepemimpinan serta Meningkatkan Kinerja untuk Meraih Keberhasilan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R dan D*, Bandung, Alfabeta.
- Suprijadi, Anwar, 2015, *Acuan Umum Penerapan Good Governance pada Sektor Publik*, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia,

Tannebaum, 2012, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Terry, GR, 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi* .Jakarta.PT Indeks.

Weny A. Dunga, Abdul Hamid Tome, Apriyanto Moha, 2016, *Penerapan Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara.

Widodo. Nugroho, 2011, *Good Governance Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya Insan Cendekia.